KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Distribusi Dokter Internis, komisi IX DPR usul berikan insentif layak
Tanggal : Sabtu, 17 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Distribusi Dokter Internis

Komisi IX DPR Usul Berikan Insentif Layak

ANGGOTA Komisi IX DPR Sri Meliyana menyoroti kurangnya dokter spesialis penyakit dalam (internis) di berbagai daerah. Persoalan utama bukan pada jumlah dokter, melainkan ketidakseimbangan penempatan tenaga medis, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Sri menilai, penugasan dokter spesialis ke daerah belum berjalan optimal. Saat ini memang terdapat program wajib kerja dokter spesialis, namun tingkat serapannya baru sekitar 20 persen, sehingga belum efektif menjawab kebutuhan daerah.

"Artinya, kebijakan yang ada belum cukup kuat untuk mendorong pemerataan dokter spesialis," ujarnya.

Sri mendorong adanya kebijakan afirmatif konkret, seperti pemberian insentif, jaminan keamanan, serta kepastian kesejahteraan bagi dokter yang bertugas di wilayah kekurangan tenaga medis. Tanpa insentif dan perlindungan memadai, dokter cenderung memilih bertugas di kota-kota besar.

"Komisi IX DPR mendorong Pemerintah menata ulang distribusi dokter spesialis agar lebih adil dan merata. Ini penting untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat," kata Sri dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Selain itu, Sri menekankan pentingnya sinkronisasi data dokter spesialis antar lembaga. Menurutnya, hingga kini masih sering terjadi perbedaan data jumlah dan sebaran dokter internis antara Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI).

"Kalau datanya tidak sama, kebijakan yang diambil bisa keliru. Bisa muncul kesan jumlah dokter sudah cukup, padahal distribusinya belum merata," ujar legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ia mengingatkan, data yang tidak akurat berisiko menggambarkan kondisi yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan, terutama terkait kebutuhan dokter spesialis di daerah. Karena itu, ia meminta penyatuan data agar tidak menjadi dasar pengambilan keputusan yang keliru hingga ke tingkat Presiden.

Senada, anggota Komisi IX DPR Achmad Ru'yat mendorong peningkatan tunjangan khusus bagi dokter spesialis penyakit dalam. Kebijakan tersebut juga harus disertai perlindungan yang memadai bagi tenaga medis yang bertugas di daerah.

"Ilmu penyakit dalam bukan sekadar profesi, tapi pilar ketahanan nasional di bidang kesehatan. Komisi IX harus berdiri sebagai pembela tenaga medis sekaligus penjaga kualitas layanan bagi rakyat," tegas Ru'yat.

Ia menambahkan, Komisi IX telah meminta data konkret mengenai jumlah daerah dari 514 kabupaten/kota yang benar-benar belum memiliki dokter internis, serta mendorong keterlibatan PAPDI dalam merancang skema insentif bagi dokter yang ditugaskan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam PAPDI Rudy Hidayat mengakui bahwa persoalan utama saat ini memang bukan pada produksi dokter, melainkan pada distribusinya. PAPDI telah melakukan pemetaan dan menemukan bahwa jumlah dokter internis secara nasional sebenarnya mencukupi.

"Jika ada daerah yang kosong, bukan berarti kita kekurangan dokter secara nasional. Masalahnya, banyak dokter merasa tidak nyaman bertugas di daerah terpencil dan memilih berpraktik di kota besar," ujar Rudy.

Ia mengungkapkan, Jakarta bahkan mengalami kelebihan sekitar 400 dokter spesialis penyakit dalam. Kondisi ini dinilai ironis di tengah isu kekurangan dokter spesialis di berbagai daerah.

Menurut Rudy, saat ini terdapat sekitar 90 rumah sakit, baik vertikal maupun daerah, yang diminta membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) penyakit dalam.

Namun, hal tersebut justru menimbulkan kekhawatiran karena dorongan pembukaan program dinilai terlalu masif dan persyaratannya terkesan dipermudah. "Ini berpotensi berdampak pada kualitas dan tetap tidak menyelesaikan masalah distribusi," tegasnya.

Saat ini, jumlah dokter spesialis penyakit dalam di Indonesia mencapai 6.235 orang, menjadikannya spesialisasi dengan jumlah terbesar di Tanah Air. Dari total tersebut, sekitar 1.300 merupakan subspesialis. Ketimpangan distribusi dokter ini berpotensi menghambat pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah yang minim fasilitas dan tenaga medis.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit atau hospital based dijalankan untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter. "PPDS hospital based sama seperti di negara-negara maju, mengedepankan afirmasi bagi rumah sakit yang membutuhkan," ujar Budi.

Program ini memprioritaskan putra-putri daerah serta dokter yang telah bekerja di rumah sakit daerah terpencil. Lulusan PPDS berbasis rumah sakit nantinya akan ditempatkan di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

"Diproyeksikan, dokter spesialis lulusan program ini akan mengisi 347 kabupaten/kota yang hingga kini masih mengalami kekosongan," jelasnya. ■ PYB